

# Bemberdayaan Perempuan Pedesaan

Pengembangan Metodologis Kajian Perempuan  
Prof. Dr. Pudjiwati Sajogyo

Kata Pengantar: Vita G. Lawan Fauzi, Ketua Tim Penggerak PKK Nasional



Editor: Ekawati S. Wahyuni dan Lala M. Kolopaking



# **B**emberdayaan *Perempuan* **P**edesaan

Pengembangan Metodologis Kajian Perempuan  
Prof. Dr. Pudjiwati Sajogyo



# **B**emberdayaan *B*erempuan **P**edesaan

Pengembangan Metodologis Kajian Perempuan  
Prof. Dr. Pudjiwati Sajogyo

## PENULIS:

Pudjiwati Sajogyo (Alm.)  
Aida Vitayala Hubeis  
Clara M. Kusharto  
Dwi Astuti  
Dwi Sadono  
Ekawati S. Wahyuni  
Henny Windarti  
Herien Puspitawati  
Julia Indrawati Sari  
Keppi Sukesi  
Lala M. Kolopaking  
Lisna Y. Poeloengan  
Maihasni  
Melani A. Sunito  
Mohammad Iqbal Banna  
Murdianto  
Siti Amanah  
Siti Madaniyah  
Siti Sugiah M. Mugniesyah  
Titik Sumarti  
Tyas Retno Wulan  
Ulfa Hidayati  
Winati Wigna

## EDITOR:

Ekawati Sri Wahyuni  
Lala M. Kolopaking

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEDESAAN  
Pengembangan Metodologis Kajian Perempuan Prof. Pudjiwati Sajogyo

Penulis:

Aida Vitayala Hubeis - Clara M. Kusharto - Dwi Astuti - Dwi Sadono -  
Ekawati S. Wahyuni - Henny Windarti - Herien Puspitawati - Julia Indrawati  
Sari - Keppi Sukesni - Lala M. Kolopaking - Lisna Y. Poeloengan - Maihasni -  
Melani A. Sunito - Mohammad Iqbal Banna - Murdianto - Pudjiwati Sajogyo  
(Alm.) - Siti Amanah - Siti Madaniyah - Siti Sugiah M. Mugniyah - Titik  
Sumarti - Tyas Retno Wulan - Ulfa Hidayati - Winati Wigna

Editor:

Ekawati S. Wahyuni  
Lala M. Kolopaking

Layout:

Tim PSP3: Mohammad Iqbal Banna, Hurriyatun Nadra, Fenita Ayu Kusuma,  
Amelia Andremica,

Desain Buku dan Kulit Sampul:

Mohammad Iqbal Banna

Diterbitkan pertama kali, Juni 2010

oleh

Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB

Kampus IPB Baranangsiang

Jl. Raya Pajajaran - Bogor

Telp. 0251 - 8345724, e-mail: [psp3@ipb.ac.id](mailto:psp3@ipb.ac.id)

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh  
Isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit  
ISBN: 978-979-8637-60-5

# DAFTAR ISI

Halaman

## PENGANTAR

Perempuan Pedesaan: Dari Kajian Peranan Hingga Pemberdayaan  
(Ekawati S. Wahyuni, Lala M. Kolopaking)..... 1

## A. KAJIAN AWAL MENGENAI KELUARGA DAN PEREMPUAN PEDESAAN DI INDONESIA

- BAB 1 Pendekatan dan Identifikasi Instrumen Penelitian Wanita:  
Kasus Wanita di Pedesaan (Pudjiwati Sajogyo)..... 21
- BAB 2 Pola Bekerja Wanita Pedesaan dalam Pembangunan  
(Pudjiwati Sajogyo)..... 37
- BAB 3 Penelitian Wanita dan Pembangunan Pedesaan di  
Indonesia Periode 1981-1987 (Pudjiwati Sajogyo)..... 75
- BAB 4 Kajian Perempuan dan Keluarga Pedesaan: Dari  
Disertasi ke Studi Perempuan di Indonesia (Lala M.  
Kolopaking, Tyas Retno Wulan, Maihasni, Ekawati S.  
Wahyuni)..... 91
- BAB 5 Dinamika Hubungan Gender Di Pedesaan Jawa dalam  
Tiga Dasawarsa (1978-2008) (Keppi Sukesi)..... 125

## B. PERKEMBANGAN KAJIAN PERAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEDESAAN

- BAB 6 Pemberdayaan Keluarga Petani Melalui Peningkatan  
Akses Perempuan terhadap Skim Kredit Bergulir Usaha  
Kulawargi Mandiri (Siti Sugiah M. Mugniesyah, Henny  
Windarti, Herien Puspitawati)..... 153
- BAB 7 Partisipasi Perempuan untuk Meningkatkan Taraf Hidup  
Keluarga (Winati Wigna, Herien Puspitawati)..... 175
- BAB 8 Memaknai Internasionalisasi Perempuan Pedesaan (Lala  
M. Kolopaking)..... 207
- BAB 9 Desain Pemberdayaan Buruh Migran Perempuan  
Indonesia untuk Peningkatan Pembangunan dan  
Lingkungan Permukiman Daerah Asal (Lisna  
Y.Poeloengan dan M.Iqbal Banna)..... 233



### **C. KAJIAN APLIKASI KEBIJAKAN BERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, KELUARGA, DAN PEREMPUAN**

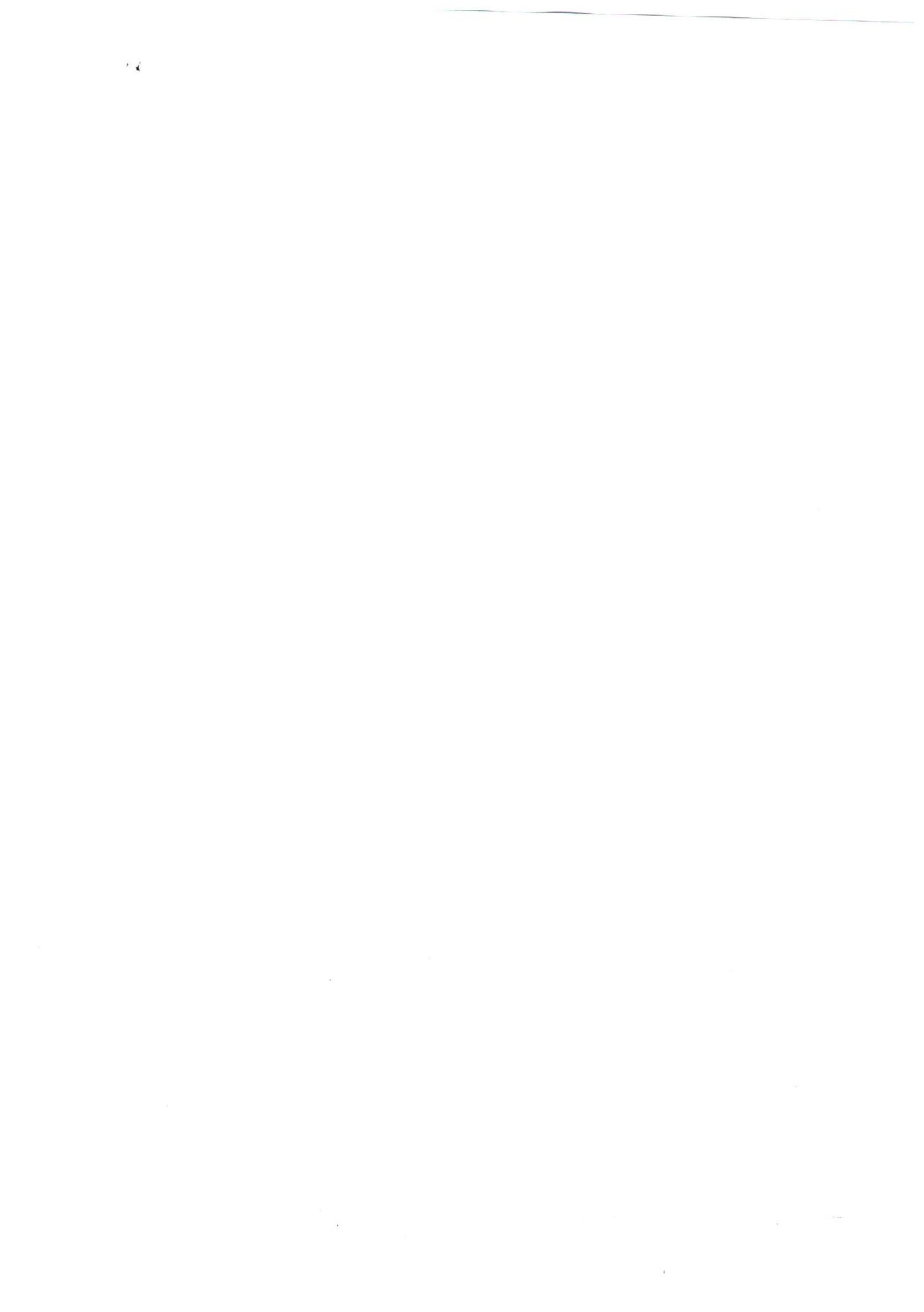
BAB 10	Pemberantasan Buta Aksara sebagai Cara Pemberdayaan Perempuan (Ekawati S. Wahyuni, Winati Wigna, Murdianto, Dwi Sadono).....	257
BAB 11	Kajian Pelayanan Kesehatan bagi Ibu dan Anak di Pedesaan (Titik Sumarti).....	289
BAB 12	Situasi Pangan dan Gizi dan Penanggulangannya di Kabupaten Bogor (Clara M. Kusharto, Siti Madaniyah).....	317
BAB 13	Upaya Pengembangan Mutu Kehidupan Masyarakat Desa Secara Berkelanjutan dan Berperspektif Gender (Siti Amanah).....	349

### **D. PERAN LSM DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

BAB 14	Perempuan Pedesaan: Liku-liku Meretas Jalan Menuju Keberdayaan (Dwi Astuti).....	381
BAB 15	Pemberdayaan Perempuan Usaha Kecil: Jalan Panjang Menuju Keberdayaan. (Julia Indrawati Sari).....	399
BAB 16	Gerakan Konservasi Perempuan Nyungcung: Hasil Interaksi antara Kemiskinan, Budaya Patriarkhi, dan Pengaruh Ornop (Ulfa Hidayati).....	423

### **E. POLITIK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

BAB 17	Menambah Rumit? Menyertakan Isu Perempuan dan Gender dalam Gerakan/Ornop Lingkungan Hidup (Melani A. Sunito).....	447
BAB 18	Studi Evaluasi Penyelenggaraan PUG di Daerah (Aida Vitayala S. Hubeis).....	459



## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Jumlah Petani Berdasarkan Status Kepemilikan.....	42
2.2	Rata-rata Jam Kerja Pria dan Wanita (Sepuluh Tahun Ke Atas) dalam Sehari untuk Pekerjaan Mencari Nafkah di Dua Desa Jawa Barat dan Satu Desa Jawa Tengah, pada tahun 1977-1978 dan 1971-1972.....	57
4.1	Kecenderungan Topik dan Sub-topik Tesis dan Disertasi Bertemakan Wanita dan Keluarga, PS SPD – SPS – IPB, 1986-2004.....	93
5.1	Jenis Pekerjaan Rokok Mesin dan Rokok Tangan serta Pembagian Kerja Laki-laki dan Perempuan.....	138
5.2	Jenis Pekerjaan Pertanian, Pembagian Kerja Berdasarkan Gender dan Tingkat Upah.....	142
6.1	Kondisi Partisipan Skim Kredit Bergulir UKM di Tiga Desa Kasus.....	158
6.2	Jenis Usaha yang Dkembangkan Partisipan Skim Kredit UKM di Tiga Desa Kasus (dalam jumlah dan %). .....	160
6.3	Pengambil Keputusan Usaha Produktif Partisipan UKM di Tiga Desa Kasus (%). .....	161
6.4	Pelaku Usaha Produktif Partisipan UKM di Tiga Desa Kasus (%). .....	162
6.5	Alokasi Kredit UKM dalam Kegiatan Produktif di Tiga Desa Kasus (%). .....	163
6.6	Perkembangan Jumlah Kredit dan Infak UKM di Tiga Desa Kasus Periode 2001-2003 (dalam Rupiah). .....	164
6.7	Perkembangan Tabungan UKM di Tiga Desa Kasus Menurut Nama Rembug Pusat dan Jenis Tabungan.....	166
6.8	Frekuensi Penundaan Angsuran Partisipan UKM di Tiga Desa Kasus.....	168
6.9	Posisi Pinjaman, Pengembalian, Tabungan dan Jumlah Anggota Skim Kredit UKM di Tiga Desa di Tiga Kabupaten di Jawa Barat per 21 November 2003.....	169

6.10	Jumlah Kredit dan Infak UKM di Tiga Desa Kasus Tahun Ke-3.....	170
7.1	Indeks Manusia Pembangunan NTB, Tahun 1996 dan 1999.....	181
7.2	Persentase Rumah tangga yang Mendapat Bantuan Pangan/Sembako/Kredit pada Januari-Desember 2002 menurut Jenis Bantuan, 2003.....	182
7.3	Nama KPK Di Desa Terara dan Desa Bujak Menurut Waktu Pendirian.....	184
7.4	Posisi Responden dalam Kepengurusan KPK (n=55) di Desa Penelitian di NTB, 2003.....	186
7.5	Jenis Kegiatan Usaha dan Bentuk Usaha Individu.....	187
7.6	Komposisi Responden KPK Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, NTB 2003.....	189
7.7	Laporan Keuangan dan Statistik (LKS) LKM Teratai, Desa Terara, Kecamatan Terara, NTB, 2003.....	192
7.8	Motivasi yang Mendorong Perempuan Menjadi Anggota KPK.....	197
8.1	Peta Permasalahan dan Kreasi BMP Mengatasinya di Arab Saudi.....	216
8.2	Peta Permasalahan dan Kreasi BMP Mengatasinya di Hong Kong.....	221
9.1	Jenis Data, Metode Pengumpulan dan Sumber Data.....	240
9.2	Analisis Kebutuhan Stakeholders pada Dimensi Kebijakan Publik.....	242
9.3	Perbedaan Berbagai Aspek Kehidupan Rumah tangga Antara Sebelum dan Sesudah Menjadi BMP.....	246
10.1	Jumlah dan Persentase Buta Aksara di Indonesia Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 1990 dan 2003.....	268
10.2	Jumlah dan Persentase Penduduk Buta Aksara Usia 10 - 44 Tahun di Empat Provinsi Penelitian, 2003.....	269
10.3	Profil Perempuan Buta Aksara di Empat Propinsi.....	270
10.4	Pentingnya Kemampuan Baca Tulis dan Pengetahuan PLS di Empat Provinsi.....	271
10.5	Latar Belakang Keluarga Responden dan Alasan Tidak	

	Sekolah di Empat Provinsi.....	272
11.1	Kualitas Hidup Manusia dan Kualitas Hidup Perempuan Indonesia Berdasarkan IPM dan IPG Tahun 2004.....	293
11.2	Alternatif Daerah sebagai Lokasi Kegiatan.....	296
11.3	AKI di Kabupaten Bandung (Jawa Barat), Kabupaten Bantul (D.I. Yogyakarta) dan Kabupaten Solok (Sumatera Barat) pada Tahun 2000 – 2004.....	296
11.4	AKB di Kabupaten Bandung (Jawa Barat), Kabupaten Bantul (D.I. Yogyakarta) dan Kabupaten Solok (Sumatera Barat) pada Tahun 2001 – 2003.....	297
11.5	Umur Harapan Hidup (eo) di Kabupaten Bandung (Jawa Barat), Kabupaten Bantul (D.I. Yogyakarta) dan Kabupaten Solok (Sumatera Barat) pada Tahun 2003 – 2004.....	298
11.6	Evaluasi Kegiatan Puskesmas Cakupan Program Puskesmas Soreang Tahun 2003.....	299
11.7	Jumlah dan Persentase Responden Pengguna Puskesmas Menurut Tingkat Kemiskinan dan Kabupaten Tahun 2005	304
11.8	Jumlah dan Persentase Responden Pengguna Puskesmas Menurut Status Asuransi Kesehatan dan Kabupaten tahun 2005.....	305
11.9	Jumlah dan Persentase Responden Pengguna Puskesmas Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten tahun 2005.....	306
11.10	Jumlah dan Persentase Responden Menurut Fasilitas Kesehatan yang Paling Sering Digunakan dan Kabupaten tahun 2005.....	307
11.11	Jumlah dan Persentase Responden Menurut Lokasi Fasilitas Kesehatan dan Kabupaten Tahun 2005.....	308
11.12	Jumlah dan Persentase Responden Menurut Penerima Bantuan Program Pelayanan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Kabupaten Tahun 2005.....	312
11.13	Jumlah dan Persentase Responden menurut Tindakan yang dilakukan dalam kondisi darurat dan Kabupaten Tahun 2005.....	313
12.1	Peringkat kualitas SDM diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (HDI).....	321

12.2	Beberapa bencana alam yang terjadi di Indonesia (Sejak Tahun 1907).....	324
12.3	Dampak Kekurangan Zat Gizi pada Masa Hamil Hingga Lanjut Usia.....	326
12.4	Tanda Dan Gejala Kurang Energi Protein.....	328
12.5	Prevalensi Anemia Gizi Besi Anak Balita Berdasarkan SKRT 2001.....	330
12.6	Prevalensi Anemia Gizi Besi Tahun 2001 pada Wanita Usia Subur (WUS).....	331
12.7	Prevalensi Kegemukan pada Anak dari Berbagai Penelitian di Indonesia.....	334
12.8	Hasil Kegiatan PMT-P di Kabupaten Bogor Tahun 2007.....	344
12.9	Hasil Penanganan Gizi Buruk Di Klinik Gizi di Kabupaten Bogor Tahun 2007.....	346
13.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia menurut Daerah, 1996-2005.....	357
13.2	Kekhasan Kelembagaan Desa di Masing-masing Lokasi Studi.....	360
13.3	Data yang Digunakan dalam Studi.....	361
13.4	Keadilan dan Kesetaraan Gender pada Beberapa Segi Kehidupan.....	372
13.5	Sistem Sosial Masyarakat Desa Kajian di Lima Provinsi.....	373
13.6	Indeks HDI, GDI dan GEM pada Lima Provinsi.....	377
18.1	Kebijakan Pembangunan Daerah Responsif Gender, 2006	481
18.2	Persentase Efisiensi Pelaksanaan PUG Daerah, 2006.....	485

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
4.1	Jejaring Konsep Dominan Studi Perempuan dan Keluarga.....	100
8.1	Bagan Alir Kajian.....	212
8.2	Pemahaman BMP sebagai Bagian dari Sistem Bekerja ke Luar Negeri.....	226
9.1	Alur Kerja Penelitian.....	239
9.2	Diagram Sistem Pemberdayaan BMP Dalam Rangka Perbaikan Kualitas SDA dan Permukiman di Daerah Asal.....	243
9.3	Bagan Desain Kelembagaan.....	252
12.1	Aspek Kehidupan dalam IPM.....	321
12.2	Permasalahan Gizi di Indonesia.....	322
12.3	Dampak Kekurangan Zat Gizi pada Masa Janin dan Anak Umur 0-3 Tahun.....	325
12.4	Berbagai Penyebab Terjadinya Gizi Buruk.....	327
12.5	Pertumbuhan Anak Indonesia.....	328
12.6	Peta Sebaran Defisiensi Vitamin A Negara-negara di Dunia Tahun 2004.....	329
12.7	Lama Melihat pada Bayi Sehat dan Kurang Fe.....	331
12.8	Umur Mulai Merangkak pada Bayi Sehat dan Kekurangan Fe.....	332
12.9	Hasil bulan penimbangan balita pada tahun 2007.....	336
12.10	Status Gizi Balita Di Kabupaten Bogor Tahun 2007.....	337
12.11	Temuan Baru Kasus Gizi Buruk Tingkat Berat Tahun 2007.....	338
12.12	Prevalensi Anemia dan KEK Ibu Hamil di Kabupaten Bogor.....	338
12.13	Cakupan Program Gizi (SKDN) Tahun 2007.....	339
12.14	Cakupan Distribusi Fe1 Dan Fe3 Tahun 2007.....	339
12.15	Cakupan Distribusi Fe pada Ibu Nifas tahun 2007.....	340

12.16	Cakupan Vitamin A Tahun 2007.....	341
12.17	Hasil Pemantauan Konsumsi Garam Beriodium Tingkat Masyarakat Pada Bulan Februari 2007.....	341
13.1	Upaya Peningkatan Mutu Kehidupan Masyarakat Desa...	378
18.1	Komitmen Kelembagaan PP dalam PUG 2006.....	479
18.2	Total APBD dan Total Dana Responsif Gender di Daerah	483
18.3	Komitmen Kebijakan Daerah Dalam Implementasi PUG, 2006.....	486
18.4	Forum Pendukung Implementasi PUG, PP dan PA di Lokasi Studi.....	488
18.5	Pelaksanaan Pemampuan PUG di Lokasi Studi, 2006.....	492
18.6	Ketersediaan Data Terpilah Gender di Lokasi Studi, 2006.....	494
18.7	Hasil Skoring <i>Success Story</i> .....	494
18.8	Efisiensi penyelenggaraan PUG di daerah, 2006.....	495

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Jumlah Jam Kerja Rata-rata dalam Sehari untuk Pria dan Wanita dalam Berbagai Pekerjaan di Bidang Pertanian dan Non-pertanian di Kedua Desa Penelitian Daerah Sukabumi dan Sumedang Jawa Barat (1977-1978).....	69
2	Imbalan Kerja oleh Pekerja Wanita dan Pria pada Pekerjaan Buruh Tani, Buruh dan Jasa per Jam (Rp/jam) Selama Setahun (1977-1978) Menurut Lapisan di Daerah Sukabumi dan Sumedang, Jawa Barat.....	70
3	Imbalan Kerja Rumahtangga (Rp/jam) (kg.beras/jam) (% waktu yang digunakan) dari Beragam Kegiatan Mencari Nafkah Pada Berbagai Lapisan, di Desa A (Sukabumi) dan Desa B (Sumedang), Jawa Barat, 1977-1978.....	71
4	Ragam Usaha Mencari Nafkah Menurut Alokasi (%) jam Kerja dan Tingkat Imbalan Kerja (Rp/jam) di Desa A (Sukabumi) dan Desa B (Sumedang) Jawa Barat 1977—1978.....	72
5	Rata-rata Jam Kerja dalam Sehari: Pria dan Wanita dalam Pekerjaan Rumahtangga dan Pekerjaan Nafkah di Lima Provinsi, 1981 – 1982.....	73
6	Pemberdayaan Keluarga Petani melalui Skim UKM.....	173
7	TERJEMAHAN SURAT AL-BAQARAH 282.....	174



## SAMBUTAN KETUA TIM PENGGERAK PKK NASIONAL

Pemikiran mengenai peran perempuan pedesaan dalam pembangunan tidak dapat dilepaskan dari kerja Almarhumah Prof. Dr. Ir. Pudjiwati Sajogyo, M.Sc., Guru Besar Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Perhatian Almarhumah terhadap peranan perempuan pedesaan dalam pembangunan sebagai suatu subjek kajian akademik mulai berkembang ketika terlibat dalam proyek penyuluhan gizi masyarakat di desa-desa di Jawa Barat pada tahun 70-an. Perkenalan terhadap masalah-masalah keseharian perempuan pedesaan, telah menginspirasi Almarhumah untuk mengembangkan pemikiran untuk mengangkat pentingnya peran perempuan dalam pembangunan agar diketahui dan diakui oleh masyarakat yang lebih luas. Almarhumah juga menularkan pemikiran tersebut kepada mahasiswanya yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia untuk juga mengungkapkan permasalahan perempuan pedesaan dalam suatu kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil kajian-kajian ini menegaskan bahwa berbagai kegiatan "ibu-ibu PKK" sejatinya telah menyumbang kepada peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.

Berbagai program pembangunan pedesaan, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan aktif perempuan. Perempuan pedesaan tidak saja sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan tetapi juga menjadi target langsung dari program-program pembangunan tersebut. Namun, meskipun perannya besar dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi belum banyak mengubah posisi perempuan dalam masyarakat. Perempuan masih diposisikan sebagai orang kedua yang suaranya tidak didengar, partisipasi dalam pembangunan dianggap minimal dan sumbangannya bagi ekonomi rumah tangga dianggap kurang penting. Hasil-hasil kajian dalam buku ini membuktikan bahwa masih banyak kendala yang harus dihadapi oleh para perempuan pedesaan untuk dapat

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga dan masyarakat, sehingga kajian mengenai peran perempuan pedesaan dalam pembangunan adalah suatu keniscayaan.

Kehadiran buku ini telah menambah wawasan kita, bahwa para perempuan pedesaan di Indonesia selalu menjadi aktor penting dalam kegiatan pembangunan di berbagai bidang. Di masa mendatang, penelitian-penelitian tentang peran perempuan pedesaan hendaknya lebih banyak yang bersifat penelitian aksi (kaji-tindak), agar proses pembelajaran juga dapat segera dirasakan oleh para perempuan pedesaan itu, dan tidak sekedar menjadi "obyek" penelitian belaka" dan dapat meningkatkan partisipasi mereka untuk melaksanakan program-program pembangunan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga masing-masing. Berbagai permasalahan yang dapat dikerjakan bersama-sama oleh peneliti dari perguruan tinggi dan perempuan pedesaan meliputi: pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, pengentasan buta aksara bagi perempuan usia produktif, ancaman pernikahan usia muda dan kesehatan reproduksi; kesehatan keluarga dan kekurangan gizi, kurangnya kepastian kerja dan berusaha, misalnya kekurangan modal usaha, perawatan lanjut usia, belum terjaminnya keselamatan kerja perempuan yang bekerja di luar negeri dan ancaman kerusakan lingkungan yang akan membebani perempuan. Kepada para peneliti yang telah terlibat langsung dengan perempuan pedesaan kami berharap untuk tidak segan dan bosan terus terlibat langsung memajukan perempuan pedesaan.

Jakarta, Juni 2010

Ketua Tim Penggerak PKK Nasional

Vita Gamawan Fauzi

## KATA PENGANTAR KEPALA PSP3-IPB

Penyusunan buku ini dimaksudkan sebagai dokumentasi pemikiran yang pernah dicetuskan oleh Prof. Dr. Ir. Pudjiwati Sajogyo, MSc ketika menjadi peneliti senior di Pusat Studi Pembangunan (PSP) – Lembaga Penelitian (LP) – Institut Pertanian Bogor (IPB). Upaya ini terlaksana atas anjuran Prof. Sajogyo yang menghimbau agar pemikiran-pemikiran tentang pemberdayaan perempuan di pedesaan tetap hidup, bahkan terus dikembangkan. Tanpa sokongan dan anjuran Prof. Sajogyo, maka buku ini tidak akan terwujud.

Buku ini menggambarkan secara sistematis perkembangan pemikiran yang menjadi ciri tradisi pemikiran tentang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga termasuk perlindungan anak di lingkungan IPB. Pada gilirannya, pemikiran tersebut menjadi cikal dibentuknya Pusat Studi Wanita di LP – IPB pada tahun 1991. Pada masa yang akan datang, tradisi pemikiran yang dikembangkan dalam buku ini dapat menjadi metodologi bagi kajian atas pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan perlindungan anak di lingkungan IPB.

Dalam penyajiannya, buku ini terbagi ke dalam lima bagian besar, masing-masing adalah (i) Kajian Awal Mengenai Keluarga dan Perempuan Pedesaan di Indonesia, (ii) Perkembangan Kajian Peran dan Pemberdayaan Perempuan Pedesaan, (iii) Kajian Aplikasi Kebijakan Berkait Kesejahteraan Masyarakat, Keluarga dan Perempuan, (iv) Peran LSM dalam Pemberdayaan Perempuan dan (v) Politik Pemberdayaan Perempuan. Dalam kesempatan ini, saya sebagai Kepala PSP3-IPB sekaligus editor menyampaikan ucapan terima kasih kepada para penulis yang telah menyumbangkan pemikirannya pada buku ini, masing-masing adalah Bapak-bapak dan Ibu-ibu Pudjiwati Sajogyo (Alm.), Aida Vitayala Hubeis, Clara M. Kusharto, Dwi Astuti, Dwi Sadono, Ekawati S. Wahyuni, Henny Windarti, Herien Puspitawati, Julia Indrawati Sari, Keppi Sukesi, Lala M. Kolopaking, Lisna Y. Poeloengan, Maihasni, Melani A. Sunito,

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga dan masyarakat, sehingga kajian mengenai peran perempuan pedesaan dalam pembangunan adalah suatu keniscayaan.

Kehadiran buku ini telah menambah wawasan kita, bahwa para perempuan pedesaan di Indonesia selalu menjadi aktor penting dalam kegiatan pembangunan di berbagai bidang. Di masa mendatang, penelitian-penelitian tentang peran perempuan pedesaan hendaknya lebih banyak yang bersifat penelitian aksi (kaji-tindak), agar proses pembelajaran juga dapat segera dirasakan oleh para perempuan pedesaan itu, dan tidak sekedar menjadi "obyek" penelitian belaka" dan dapat meningkatkan partisipasi mereka untuk melaksanakan program-program pembangunan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga masing-masing. Berbagai permasalahan yang dapat dikerjakan bersama-sama oleh peneliti dari perguruan tinggi dan perempuan pedesaan meliputi: pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, pengentasan buta aksara bagi perempuan usia produktif, ancaman pernikahan usia muda dan kesehatan reproduksi, kesehatan keluarga dan kekurangan gizi, kurangnya kepastian kerja dan berusaha, misalnya kekurangan modal usaha, perawatan lanjut usia, belum terjaminnya keselamatan kerja perempuan yang bekerja di luar negeri dan ancaman kerusakan lingkungan yang akan membebani perempuan. Kepada para peneliti yang telah terlibat langsung dengan perempuan pedesaan kami berharap untuk tidak segan dan bosan terus terlibat langsung memajukan perempuan pedesaan.

Jakarta, Juni 2010

Ketua Tim Penggerak PKK Nasional

Vita Gamawan Fauzi

## KATA PENGANTAR KEPALA PSP3-IPB

Penyusunan buku ini dimaksudkan sebagai dokumentasi pemikiran yang pernah dicetuskan oleh Prof. Dr. Ir. Pudjiwati Sajogyo, MSc ketika menjadi peneliti senior di Pusat Studi Pembangunan (PSP) – Lembaga Penelitian (LP) – Institut Pertanian Bogor (IPB). Upaya ini terlaksana atas anjuran Prof. Sajogyo yang menghimbau agar pemikiran-pemikiran tentang pemberdayaan perempuan di pedesaan tetap hidup, bahkan terus dikembangkan. Tanpa sokongan dan anjuran Prof. Sajogyo, maka buku ini tidak akan terwujud.

Buku ini menggambarkan secara sistematis perkembangan pemikiran yang menjadi ciri tradisi pemikiran tentang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga termasuk perlindungan anak di lingkungan IPB. Pada gilirannya, pemikiran tersebut menjadi cikal dibentuknya Pusat Studi Wanita di LP – IPB pada tahun 1991. Pada masa yang akan datang, tradisi pemikiran yang dikembangkan dalam buku ini dapat menjadi metodologi bagi kajian atas pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan perlindungan anak di lingkungan IPB.

Dalam penyajiannya, buku ini terbagi ke dalam lima bagian besar, masing-masing adalah (i) Kajian Awal Mengenai Keluarga dan Perempuan Pedesaan di Indonesia, (ii) Perkembangan Kajian Peran dan Pemberdayaan Perempuan Pedesaan, (iii) Kajian Aplikasi Kebijakan Berkait Kesejahteraan Masyarakat, Keluarga dan Perempuan, (iv) Peran LSM dalam Pemberdayaan Perempuan dan (v) Politik Pemberdayaan Perempuan. Dalam kesempatan ini, saya sebagai Kepala PSP3-IPB sekaligus editor menyampaikan ucapan terima kasih kepada para penulis yang telah menyumbangkan pemikirannya pada buku ini, masing-masing adalah Bapak-bapak dan Ibu-ibu Pudjiwati Sajogyo (Alm.), Aida Vitayala Hubeis, Clara M. Kusharto, Dwi Astuti, Dwi Sadono, Ekawati S. Wahyuni, Henny Windarti, Herien Puspitawati, Julia Indrawati Sari, Keppi Sukesi, Lala M. Kolopaking, Lisna Y. Poeloengan, Maihasni, Melani A. Sunito,

Mohammad Iqbal Banna, Murdianto, Siti Amanah, Siti Madaniyah, Siti, Sugiah M. Mugniesyah, Titik Sumarti, Tyas Retno Wulan, Ulfa Hidayati dan Winati Wigna. Selain itu, sekali lagi atas nama PSP3 saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Sajogyo yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah mendukung sampai pada terwujudnya buku pemberdayaan perempuan di pedesaan ini.

Semoga buku ini menjadi pendorong agar metode kajian pemberdayaan perempuan terus dikembangkan di lingkungan IPB dan menjadi proses yang memperkuat tradisi kajian.

Lala M. Kolopaking

## DAFTAR NAMA PENULIS

- Aida Vitayala Hubeis* – Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
- Clara M. Kusharto* – Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
- Dwi Astuti* – Direktur Bina Desa, Jakarta.
- Dwi Sadono* – Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
- Ekawati S. Wahyuni* - Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
- Henny Windarti* – Lembaga Penelitian, Institut Pertanian Bogor.
- Herien Puspitawati* – Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
- Julia Indrawati Sari* – Yayasan AKATIGA, Bandung.
- Keppi Sukesi* – Kepala Pusat Penelitian Gender, Universitas Brawijaya Malang.
- Lala M. Kolopaking* – Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Lembaga Penelitian, Institut Pertanian Bogor.
- Lisna Y. Poeloengan* – Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia.
- Maihasni* – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang.
- Melani A. Sunito* – Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
- Mohammad Iqbal Banna* – Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Institut Pertanian Bogor.
- Murdianto* – Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
- Pudjiwati Sajogyo (Alm.)* – Guru Besar, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
-

*Siti Amanah* – Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Lembaga Penelitian, Institut Pertanian Bogor.

*Siti Madaniyah* – Departemen Ilmu Gizi, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

*Siti Sugiah M. Mugniyah* – Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

*Titik Sumarti* – Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

*Tyas Retno Wulan* – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djendral Soediman, Purwokerto.

*Ulfa Hidayati* – Kapal Perempuan, Jakarta.

*Winati Wigna* – Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

## GLOSSARY

AGB	Anemia Gizi Besi
AK	Angkatan Kerja
AKB	Angka Kematian Bayi
AKI	Angka Kematian Ibu
APBD	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APN	Access Point Name
ARG	Anggaran Responsif Gender
ASEAN	Association of Southeast Asia Nation
ASI	Air Susu Ibu
Askes	Asuransi Kesehatan
ASSPLUK	Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BB/U	Berat Badan/Umur
BBLR	Berat Badan Lahir Rendah
BKB	Bina keluarga dan Balita
BMP	Buruh Migran Perempuan
BPD	Badan Perwakilan Desa
BPFA	Beijing Platform For Action
BPN	Badan Perwakilan Nagari
BPS	Badan Pusat Statistik
BRI	Bank Rakyat Indonesia
CCF	Cristian Church Fund
CD	Community Development
CEDAW	Convention on The Elimination of All Form Discrimination Against Women
CO	Community Organizing
DAU	Dana Alokasi Umum
Dekon	Dana Konsentrasi

Deptan	Departemen Pertanian
DKM	Dewan Keluarga Masjid
FAO	Food and Agriculture Organization
FGD	Focus Group Discussion
GAD	Gender and Development
GAKI	Gangguan Akibat Kekurangan Iodium
Gakin	Keluarga Miskin
GB	Gizi Baik
GBHN	Garis Besar Haluan Negara
GDI	Gender Related Development Index
GDP	Gender dan Pembangunan
GDP	Gross Domestic Product
GEM	Gender Empowerment Measure
GFP	Gender Focal Point
GNP	Gross National Product
GNP-PWB/PBA	Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar/Pemberantasan Buta Aksara
GSI	Gerakan Sayang Ibu
HAM	Hak Asasi Manusia
Hb	Haemoglobin
HDI	Human Development Index
HIV	Human Immunodeficiency Virus
HMA	Hari Makan Anak
HPH	Hak Pengusahaan Hutan
HPI	Human Poverty Index
IPB	Institut Pertanian Bogor
IFAD	International Fund for Agricultural Development
IHDR	Indonesian Human Development Report
IMR	Infant Mortality Rate
Inpres	Instruksi Presiden

IPM	Indeks Pembangunan Manusia
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
ISO	International Standardization Organization
ISPA	Infeksi Saluran Pernapasan Akut
IQ	Intelligence Quotient
JIFPro	Japan International Forestry Promotion
JKM	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
JPS	Jaringan Pengaman Sosial
KB	Keluarga Berencana
KBU	Kelompok Belajar Usaha
KEK	Kekurangan Energi Kronis
Kepmen	Keputusan Menteri
Kepmendagri	Keputusan Menteri Dalam Negeri
KDRT	Kekerasan Dalam Rumahtangga
KEK	Kerang Energi Kronik
Kesga	Kesehatan Keluarga
KF	Keaksaraan Fungsional
KIA	Kesehatan Ibu dan Anak
KJRI	Konsultan Kerja Republik Indonesia
KKG	Kesetaraan dan Keadilan Gender
KLB	Kejadian Luar Biasa
KNPP	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
KPA	Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
KPK	Kelompok Petani dan Nelayan Kecil
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
KSM	Kelompok Swadaya Masyarakat
KTD	Kehamilan Tak Diinginkan
KT	Konferensi Tingkat Tinggi
KUM	Kredit Usaha Mandiri
KUR	Karya Usaha Mandiri

---

LKM	Lembaga Keuangan Mikro
LKMD	Lembaga Keuangan Masyarakat Desa
LPD	Lembaga Pemerintah Departemen
LPD	Lembaga Perkreditan Desa
LPND	Lembaga Pemerintah Non Departemen
LP2M	Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat
LP2SD	Lembaga Penelitian & Pengkajian Sumberdaya
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MenHut	Menteri Kehutanan
Menmud UPW	Menteri Muda Urusan Peranan Wanita
Menneg UPW	Kementerian Negara Urusan Peningkatan Peranan Wanita
MDGs	Milenium Development Goals
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
Musrenbangdes	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa
NAD	Nanggroe Aceh Darussalam
NGO	Non Government Organization
NTB	Nusa Tenggara Barat
NTT	Nusa Tenggara Timur
Ornop	Organisasi Non Pemerintah
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDD	Perempuan dan Pembangunan
Pemda	Pemerintah Daerah
Perda	Peraturan Daerah
Perdes	Peraturan Desa
PHBS	Pembudayaan Hidup Bersih Sehat
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PHN	Public Health Nursing

Pilkada	Pemilihan Kepala Daerah
PIN	Pekan Imunisasi Nasional
PJP	Pembangunan Jangka Panjang
PJTKI	Perusahaan Jawatan Tenaga Kerja Indonesia
PKBM	Pusat Kegiatan Belajar Mengajar
PKBM	Pusat Kegiatan Belajar
PKK	Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga
PKPSBBM	Dana Kompensasi Bahan Bakar Minyak
PLKB	Petugas Lapangan Keluarga Berencana
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PLS	Pendidikan Luar Sekolah
PLTMH	Pusat Listrik Tenaga Mikro Hidro
PMT	Pemberian Makanan Tambahan
PPTKIS	Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
PS	Pusat Studi
PSP-LM	Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian
Pokja	Kelompok Kerja
PP	Pemberdayaan Perempuan
Propenas	Program Pembangunan Nasional
PSAB	Pengelolaan Sumber Air Bersih
PSW	Pusat Studi Wanita
PT	Perseroan Terbatas
PUG	Pengarusutamaan Gender
PUK	Perempuan Usaha Kecil
P2WKSS	Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera
P4K	Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil
Rakorda	Rapat Koordinasi Daerah
Raperta	Rencana Pembangunan Tahunan
Renstra	Rencana Strategik

---

RIGP	Rural Income Generation Project
RI	Republik Indonesia
RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
RKP	Rencana Kerja Pembangunan
RKPD	Rencana Kerja Pembangunan Daerah
RMI	Remote Method Invocation
RP	Rebug Pusat
RPK	Ruang Perawatan Khusus
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RS	Rumah Sakit
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
RT	Rukun Tetangga
SAE	Section on Archival Education and Training
SBMC	Solidaritas Buruh Migran Cianjur
SCN	Standing Committee Nutrition
SD	Sekolah Dasar
SDA	Sumberdaya Alam
SDM	Sumberdaya Manusia
SE	Surat Edaran
Setda	Sekretariat Daerah
SI	Surat Instruksi
SK "	Surat Keputusan
SKB	Sanggar Kegiatan Belajar
SKDN	S = Semua Balita, K= Balita dengan KMS, D= Balita yang ditimbang, N = Balita yang naik berat badannya
SKRT	Survei Kesehatan Rumahtangga
SKT	Sigaret Kretek Tangan
SKM	Sigaret Kretek Mesin

SLTA	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMU	Sekolah Menengah Umum
SPN	Sistem Perencanaan Nasional
TA	Technical Assistant
TBC	Tuberculosis
TBM	Taman Bacaan Masyarakat
TGR	Total Goiter Rate
TKI	Tenaga Kerja Indonesia
TKW	Tenaga Kerja Wanita
TLD	Tenaga Lapangan Dikmas
TNGHS	Taman Nasional Gunung Halimun Salak
TNGH	Taman Nasional Gunung Halimun
ToT	Training of Trainers
TPI	Tempat Pelelangan Ikan
TRI	Tebu Rakyat Intensifikasi
Tupoksi	Tugas Pokok dan Fungsi
UGD	Unit Gawat Darurat
UHH	Usia Harapan Hidup
UKM	Unit Kegiatan Mikro
UKM	Usaha Kecil Menengah
UKM	Usaha Kulawargi/Keluarga Mandiri
UMR	Upah Minimum Regional
UNCED	United Nations Conference on Environment and Development
UNDP	United Nations Development Program
UNESCO	United Nation Educational Scientific and Cultural Organization
UPT	Unit Pelayanan Terpadu
UPTD PLS	Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pendidikan Luar
WAD	Women and Development

---

WB	Warga Belajar
WED	Women Enviroment and Development
WHO	World Health Organization
WID	Women in Development
WRSE	Wanita Rawan Sosial Ekonomi
WUS	Wanita Usia Subur
YASPPUK	Yayasan Pendampingan Perempuan Usaha Kecil
YLPM	Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

## - BAB 10 -

# PEMBERANTASAN BUTA AKSARA SEBAGAI CARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

*Ekawati S. Wahyuni, Winati Wigna, Murdianto dan Dwi Sadono*

### PENDAHULUAN

Ukuran keberhasilan pembangunan di suatu negara tidak hanya diukur dengan rata-rata pendapatan per kapita penduduk, tetapi ditambah dengan capaian kualitas hidup manusia yang diukur dengan skor HDI atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan IPM. UNDP menetapkan IPM merupakan hasil rata-rata dari tiga indeks mutu hidup manusia, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dengan menggunakan ukuran IPM maka kemajuan pembangunan suatu negara harus dialami oleh semua penduduknya, baik laki-laki maupun perempuan, tua dan muda, tanpa terkecuali. Artinya bahwa jika dalam proses pembangunan ada kelompok yang terlewat, maka hasil pembangunan secara rata-rata tetap rendah, meskipun ada kelompok yang mencapai hasil tertinggi. Ukuran pembangunan dengan IPM memang untuk menjamin adanya pemerataan dalam hasil pembangunan.

Angka melek aksara adalah salah satu variabel dari indikator indeks pendidikan. Belum semua penduduk Indonesia melek aksara, artinya masih ada sebagian yang buta aksara. Besarnya angka buta aksara akan mempengaruhi besarnya indeks pendidikan. Berdasar data BPS (2006), angka buta aksara penduduk Indonesia mencapai 12,8 juta orang atau 0,05 % dari total jumlah penduduk. Proporsi penduduk buta aksara makin meningkat pada kelompok umur yang makin tua. Pada kelompok 15 tahun ke atas proporsi penduduk buta aksara mencapai 8,4 % dari total penduduk pada kelompok umur tersebut.

Kemudian jika dilihat menurut jenis kelamin, maka proporsi perempuan buta aksara lebih besar dari laki-laki. Rasio buta aksara menurut jenis kelamin menurut kelompok umur adalah 1,47 pada kelompok 15 - 44 tahun dan meningkat menjadi 16,36 % pada kelompok usia 60 tahun ke atas. Artinya ada kesenjangan gender dalam buta aksara, maka di sisi lain juga merupakan indikasi dari adanya kesenjangan gender dalam kemelek-aksaraan. Walaupun BPS mencatat terjadi penurunan buta aksara tiap tahunnya, namun angka buta aksara perempuan tetap lebih tinggi daripada angka pada laki-laki, khususnya pada kelompok usia tua. Tingginya angka buta aksara pada perempuan usia produktif (15 - 44 tahun) berimplikasi kepada antara lain, terbatasnya kesempatan perempuan tersebut untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, mengurus rumah tangga, atau mengembangkan diri. Untuk itu, sangatlah utama dan menjadi nilai pembangunan yang strategis jika dilaksanakan suatu tindakan bersama untuk pemberantasan buta aksara, terutama kebutaaksaraan pada perempuan.

Program peningkatan kemelek-aksaraan secara global merupakan tujuan PUS tahun 2000 yang dideklarasikan oleh UNESCO yang mendukung visi holistik pendidikan hingga pencapaian melek aksara sebesar 50 % pada tahun 2015, khususnya bagi perempuan dan akses pendidikan yang adil bagi mereka (UNESCO, 2006). Pemberdayaan perempuan melalui peningkatan keaksaraan juga mendapat perhatian melalui komitmen pencapaian MDGs yang memiliki dua tujuan terkait pada tujuan membangun pendidikan dan mendorong kesetaraan gender di dalamnya (UNDP, 2005).

Dalam merespons gerakan global pemberantasan buta huruf Indonesia dalam RPJM 2004-2009 menargetkan kemelekaksaraan pada orang dewasa menjadi 95 % pada tahun 2009 (Bappenas 2003), meskipun dalam sejarah Indonesia upaya pemberantasan buta aksara Indonesia telah dimulai sejak kemerdekaan hingga kini. Dukungan terhadap penurunan buta aksara perempuan telah dilakukan dengan dibuatnya peraturan bersama antara Menteri Departemen Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 2005 mengenai

percepatan pemberantasan buta aksara perempuan. Selain itu dikeluarkan pula Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5/2006 tentang GNP-PWB/PBA.

Program pemberantasan buta aksara perempuan usia dewasa secara praktik di lapangan dijalankan melalui kelompok-kelompok belajar yang lebih dikenal dengan KF. Program ini secara kelembagaan menjadi tanggungjawab Dikmas dan Ditjen PLS melalui UPTD PLS dan dilaksanakan oleh PKBM kabupaten/kota dan propinsi. Namun tidak selalu program pemberantasan buta aksara dilaksanakan melalui jalur kelembagaan tersebut, dapat pula melalui LSM atau organisasi masyarakat yang juga melaksanakan program pemberantasan buta aksara. Strategi pembelajaran pada program KF berbeda dengan program pemberantasan buta aksara yang lain seperti Kejar Paket A, Paket B dan Paket C, karena sasaran pada program ini adalah kelompok usia dewasa (15 - 44 tahun) dan menekankan pada fungsi program secara fungsional dengan strategi Calistungdasi serta diskusi yang proses belajarnya disesuaikan oleh konteks warga belajar (Depdiknas, 2006). Program KF juga merupakan langkah pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, membuatnya lebih berdaya baik bagi diri sendiri, bagi keluarga maupun bagi masyarakat. Walaupun ada laporan keberhasilan program KF meningkatkan kemampuan baca warga belajarnya, hasil evaluasi program KF di beberapa daerah ternyata tidak efektif, bahkan ditemukannya laporan fiktif atas terselenggaranya program kelompok belajar KF (Aminullah, 2006). Kurangnya anggaran pemerintah, kurangnya sumberdaya pengajar dan kurangnya motivasi dan kesibukan warga belajar, serta ketidakberlanjutan program menjadi alasan masalah buta aksara belum tentu tuntas dilaksanakan, dan masalah buta aksara kembali (*replaced illiterate*) dapatlah terjadi.

Tulisan ini tidak bermaksud membuat deskripsi atau evaluasi pelaksanaan program KF, tetapi akan melaporkan informasi mengenai faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi penyebab terjadinya buta aksara pada perempuan dan bagaimana perempuan itu menanggapi situasi mereka dan keinginannya untuk mampu

membaca. Tulisan ini berdasar pada penelitian mengenai faktor-faktor sosial, budaya dan ekonomi yang menyebabkan perempuan buta aksara di empat propinsi, yaitu Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan NTT. Penelitian yang didanai oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini antara lain akan berguna untuk:

1. Memperoleh data kualitatif mengenai faktor-faktor sosial, budaya dan ekonomi yang menyebabkan perempuan buta aksara, terutama di daerah sampel. Data kualitatif ini akan melengkapi data kuantitatif disribusi buta menurut daerah, umur dan jenis kelamin yang telah diterbitkan oleh BPS dan Ditjen PLS – Diknas pada tahun 2004 berdasarkan data Susenas 2003.
2. Pola pelaksanaan pemberantasan buta aksara telah dilaksanakan di daerah sampel, *stakeholders* pemberantasan buta aksara di masing-masing daerah tersebut serta permasalahan yang dihadapi.
3. Rencana atau usulan strategi pemberantasan buta aksara secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai *stakeholders* sesuai dengan peran teknis masing-masing, terutama di daerah-daerah sampel. Strategi tersebut disusun memudahkan penentuan target dan strategi pembangunan untuk pemberantasan buta aksara dalam upaya pemberdayaan perempuan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Buta Aksara

Menurut Depdiknas (2006) terdapat dua pengertian buta aksara, pertama, buta aksara absolut yaitu ketidakmampuan yang dimiliki seseorang untuk membaca dan menulis dengan huruf latin dan angka arab dalam bahasa Indonesia, serta tidak memiliki keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kedua adalah buta aksara fungsional, yang berarti ketidakmampuan melakukan kegiatan yang memerlukan kecakapan keaksaraan, misalnya membaca, menulis dan berhitung untuk bidang usaha yang menjadi mata pencaharian. Kemudian menurut Kementerian Negara

Pemberdayaan Perempuan (2007) pengertian buta aksara terbagi menjadi dua bentuk, yaitu buta aksara murni dan buta aksara praktis. Buta aksara murni yaitu dimana penduduk sama sekali tidak dapat membaca, menulis dan berhitung dengan aksara apapun, sedangkan buta aksara praktis dialami penduduk yang tidak dapat membaca, menulis dan berhitung dengan aksara latin dan angka arab, buta bahasa Indonesia dan buta pengetahuan dasar.

Sebaliknya makna melek aksara terus berkembang. Pada konferensi UNESCO tahun 1978, melek aksara merupakan penggunaan keaksaraan dalam seluruh aktivitas seseorang dan berfungsi efektif bagi kelompoknya dan masyarakat, yang juga memberi kemungkinan bagi dia untuk menggunakannya dalam membaca, menulis dan berhitung bagi perkembangan dirinya sendiri maupun masyarakat. Setelah tahun 1980-an dan 1990 keaksaraan atau melek aksara diperluas maknanya untuk mengakomodasi tantangan globalisasi termasuk dampak teknologi baru dan media informasi serta pengetahuan ekonomi. UNESCO (2006) menandakan bahwa melek aksara adalah hak dan kunci menuju hak yang lain, serta memberikan bukti tentang multi-personal, manfaat sosial dan ekonomi.

Di Indonesia pengukuran melek aksara seseorang yang digunakan dalam sensus nasional adalah kemampuan membaca dan menulis sebuah pernyataan sederhana tentang keaksaraannya sehari-hari. Dinyatakan juga dalam tulisan yang sama bahwa melek aksara di Indonesia memainkan peranan penting dalam meningkatkan kehidupan perekonomian individu yang aman dan kesehatannya bagus serta memperkaya masyarakat dengan pembangunan modal manusia, pengembangan identitas budaya dan toleransi, serta mempromosikan partisipasi warga negara.

### **Pemberantasan Buta Aksara Sebagai Upaya Pemberdayaan Perempuan**

Salah satu bentuk pemberdayaan perempuan yang akan mempengaruhi pembangunan nasional adalah pemberantasan buta

aksara. Upaya pemberdayaan perempuan dari sektor pendidikan bersifat strategis, karena perempuan yang telah melek aksara akan mempunyai kemandirian dan kepercayaan diri dalam mengatur perekonomian keluarga dan secara tidak langsung akan mengurangi tingkat kemiskinan. Selain berdampak kepada diri pribadi dan keluarga, hasil penelitian UNESCO (2006) menunjukkan bahwa pemberantasan buta aksara berdampak langsung terhadap proses pembangunan, yaitu:

1. Menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya minimal tamat SD;
3. Berhasilnya program pelaksanaan Program KB
4. Naiknya tingkat gizi dan usia harapan hidup masyarakat terhadap program pembangunan;
5. Makin demokratisnya sikap dan perilaku masyarakat.

#### **Program Keaksaraan Fungsional (KF)**

Depdiknas (2006) menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan keaksaraan fungsional adalah suatu bentuk pendekatan dalam strategi belajar dalam upaya pemberantasan buta aksara. Kegiatan belajar secara fungsional berarti mengkaitkan proses belajar pada situasi atau kondisi warga belajar yang merupakan pola pembelajaran dan pemberdayaan penduduk secara terpadu bagi penduduk usia dewasa melalui pendekatan andragogi dan integratif. Dalam pendekatan ini terdapat konsekuensi logis bagi warga belajar yaitu mereka sadar bahwa bekerja sambil belajar merupakan suatu kebutuhan di samping kewajiban. Juga diperlukan kesinambungan dalam proses pembelajaran ini, seperti pembangunan jaringan belajar, antara lain taman bacaan dan kegiatan keterampilan produktif, agar warga belajar senantiasa melek ilmu pengetahuan dan keterampilan, warga belajar tidak berhenti seusai mengikuti program KF.

Oleh karena itu, untuk menjamin keterlanjutannya, pelaksanaan program KF tidak sekedar belajar membaca, menulis dan menghitung, namun dilengkapi pula dengan tahapan lanjutan lainnya yang bertujuan memandirikan kemampuan melek aksara warga belajar. KF merupakan bagian dari lingkup kegiatan PLS yang dilaksanakan oleh PKBM yang dipusatkan pada suatu wilayah sehingga mudah diakses oleh masyarakat setempat. Namun KF juga dapat dibentuk oleh beberapa organisasi masyarakat seperti LSM, PKK, SKB, Perguruan Tinggi, Aisyiyah, GOW/BKOW, Muslimah NU, atau Wanita Islam. Menurut anjuran Depdiknas (2006), terdapat delapan prinsip utama yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan program KF, yaitu:

1. Konteks lokal, program dikembangkan berdasarkan konteks lokal yang mengacu pada konteks sosial lokal dan kebutuhan khusus pada setiap warga belajar dan masyarakat sekitarnya.
2. Desain lokal, merupakan rancangan kegiatan belajar yang dirancang oleh tutor dan warga belajar berdasarkan minat, kebutuhan, masalah, kenyataan dan potensi/sumber-sumber setempat.
3. Proses partisipatif adalah perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan program keaksaraan fungsional harus dilakukan berdasarkan strategi partisipatif
4. Fungsionalisasi hasil belajar. Hasil belajar diharapkan warga belajar dapat memfungsikan keaksaraannya untuk menganalisis dan memecahkan masalah keaksaraan yang dihadapi warga belajar.
5. Kesadaran. Proses pembelajaran keaksaraan hendaknya dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian warga belajar terhadap keadaan dan permasalahan lingkungan untuk melakukan aktivitas kehidupannya.
6. Fleksibilitas, program KF harus fleksibel, agar memungkinkan untuk di modifikasi sehingga responsif terhadap minat dan

kebutuhan belajar serta kondisi lingkungan warga belajar yang berubah dari waktu ke waktu.

7. Keanekaragaman, hendaknya bervariasi dilihat dari segi materi, metode, maupun strategi pembelajaran sehingga mampu memenuhi minat dan kebutuhan belajar warga belajar di setiap daerah yang berbeda-beda.
8. Kesesuaian hubungan belajar, dimulai dari hal-hal yang telah diketahui dan dapat dilakukan oleh warga belajar, sehingga pengalaman, kemampuan, minat dan kebutuhan belajar menjadi dasar dalam menjalin hubungan yang harmonis dan dinamis antara tutor dan warga belajar.

## METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2005 di empat propinsi, yaitu Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan NTT. Di setiap propinsi dipilih satu desa sebagai lokasi pengumpulan data atau disebut sebagai daerah sampel. Dasar pemilihan lokasi adalah berdasarkan besarnya angka buta aksara kuantitatif yang diterbitkan oleh BPS bekerjasama dengan Dirjen PLS, dan alasan teknis di lapangan yang menyangkut kemudahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data di lapangan terkait dengan keterbatasan waktu, dana dan tenaga. Adapun yang disebut sebagai daerah sampel adalah sebagai berikut:

Desa	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Provinsi
Sumber Rejo	Kerkap	Bengkulu Utara	Bengkulu
Tambak Baru Ulu	Martapura	Banjarnegara	Kalimantan Selatan
Kampili	Pallangga	Gowa	Sulawesi Selatan
Oebelo	Kupang Tengah	Kupang	NTT

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dengan penyandang buta aksara perempuan dengan menggunakan kuesioner, wawancara dengan informan terkait masalah penanganan buta aksara secara perseorangan, dan FGD dengan *stakeholders* buta aksara di tingkat desa atau kecamatan. Jumlah responden buta aksara perempuan yang telah diwawancara adalah 20 orang per desa sampel.

## HASIL PENELITIAN

### Besarnya Masalah Buta Aksara Perempuan di Indonesia

Data pada Tabel 10.1 menunjukkan bahwa jumlah dan persentase penduduk buta aksara usia < 25 tahun dan 45 tahun ke atas telah berkurang antara tahun 1990 dan 2003. Berkurangnya penyandang buta aksara umur muda karena peningkatan kesempatan bersekolah, sedangkan untuk kelompok tua kemungkinan disebabkan karena pengurangan jumlah penduduk usia tua karena kematian. Namun demikian, masih ada masalah penting yang masih harus dipecahkan, yaitu mengurangi angka buta pada kelompok masyarakat di luar usia sekolah atau tidak mungkin dilakukan melalui jalur sekolah, di antaranya adalah kelompok perempuan usia produktif. Usia 'produktif' yang dimaksud di sini adalah usia 10 – 44 tahun dan merupakan batas usia yang ditentukan oleh Ditjen PLS - Diknas untuk memungkinkan seseorang masih menyerap pelajaran dengan efektif dan kemudian memanfaatkan kemampuan membaca dan menulisnya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi produktif dan atau sebagai ibu rumah tangga bagi perempuan.

Perempuan usia produktif umumnya juga berperan penting dalam kegiatan ekonomi keluarga. Keterbatasan kemampuan membaca dan menulis menjadikan mereka kurang maksimal dalam memanfaatkan peluang-peluang ekonomi yang ada. Misalkan penyebaran informasi mengenai kesempatan memperoleh pelatihan teknis untuk meningkatkan kemampuan berusaha, kesempatan memperoleh modal untuk mengembangkan usaha, pengurusan berbagai kelengkapan administrasi dengan lembaga-lembaga

formal dan pemerintah memerlukan kemampuan membaca dan menulis.

**Tabel 10.1.** Jumlah dan Persentase Buta Aksara<sup>1</sup> di Indonesia Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 1990 dan 2003

Kelompok Umur	Persentase		Jumlah		Persentase		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P	L	P
10 – 14	2,40	2,36	265.119	246.525	1,38	1,08	157.129	114.721
15 – 24	2,60	4,93	444.273	885.062	1,32	1,58	262.376	312.097
25 – 44	8,91	18,95	2123.731	4.603.720	3,29	7,26	1.075.855	2.488.449
45+	27,87	56,39	4093.822	8.829.341	15,86	35,15	3.546.978	7.728.556
(10-44)	5,45	10,89	833.123	5.735.307	2,34	4,51	1.495.360	2.915.267

Sumber: Sensus Penduduk 1990 dan Susenas 2003

Catatan: 1) Persentase menurut total penduduk pada kelompok umur dan jenis kelamin sama

Keterbatasan ini mengakibatkan perempuan buta aksara tidak hanya mampu menghitung dalam jumlah terbatas, karena tidak mampu membaca maka semua informasi hanya diingat saja yang tentu saja terbatas, dan mereka sulit berhubungan dengan lembaga keuangan formal dan rentan terhadap praktek-praktek rentenir. Pada Tabel 10.2 disajikan data mengenai jumlah dan persentase penduduk usia produktif, 10 – 44 tahun, penyandang buta aksara menurut jenis kelamin di empat propinsi penelitian.

Tabel 10.2 di bawah ini menunjukkan bahwa persentase penduduk usia produktif masih buta huruf yang terbesar adalah di NTT, yaitu mencapai 21% untuk penduduk perempuan dan 15,52% untuk penduduk laki-laki. Sementara itu propinsi dengan persentase penduduk usia produktif terkecil adalah Bengkulu. Persentase penduduk usia produktif buta huruf di NTT dan Sulsel lebih tinggi

daripada angka nasional, sementara di Bengkulu dan Kalsel angka tersebut lebih rendah.

**Tabel 10.2.** Jumlah dan Persentase Penduduk Buta Aksara Usia 10-44 Tahun di Empat Provinsi Penelitian, 2003

Provinsi	Jumlah			Persentase <sup>1</sup>		
	L	P	L+P	L	P	L+P
Bengkulu	8373	16412	24785	1,78	3,45	2,62
NTT	174739	245141	419880	15,52	21,00	18,31
Kalimantan Selatan	18907	37448	56355	1,95	3,29	2,67
Sulawesi Selatan	179634	206677	386311	8,78	8,34	8,54
Indonesia	1495360	2915267	4410627	2,34	4,51	3,43

Sumber : BPS dan Ditjen PLS - Diknas, 2004

Catatan: 1) Persentase menurut total penduduk kelompok umur dan usia 10 - 44 tahun

Kemudian jika dilihat menurut jenis kelamin, maka angka buta aksara perempuan ternyata lebih tinggi dari laki-laki, kecuali di Sulsel angka persentase buta aksara usia produktif perempuan hampir sama dengan laki-laki. Persentase buta aksara perempuan usia produktif hampir dua kali lipat dengan persentase laki-laki. Keadaan ini sekaligus menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang melek huruf lebih rendah daripada laki-laki, artinya ada kesenjangan gender dalam hal kemampuan membaca dan menulis.

### Profil Perempuan Buta Aksara dan Faktor-faktor Penyebabnya

Setiap desa contoh telah dipilih 20 orang perempuan buta aksara usia produktif untuk sebagai sampel penelitian, ringkasan profil responden ditampilkan pada Tabel 10.3. Rata-rata umur responden adalah antara 33 tahun di NTT sampai 39 tahun di Bengkulu. Rata-rata umur kawin pertama di Bengkulu dan Kalimantan Selatan

adalah rendah, tetapi relatif tinggi di Sulawesi Selatan dan NTT. Hampir semua responden pernah duduk di bangku SD, tetapi semua putus sekolah. Akibatnya mereka saat ini tidak dapat membaca dan menulis, kalau juga ada hanya mampu membaca dengan tidak lancar. Namun, mereka umumnya dapat membaca huruf arab, kecuali di NTT yang memang bukan tradisinya untuk membaca huruf arab. Hampir semua perempuan buta aksara yang diwawancara tersebut bekerja sebagai petani, sebagian kecil berdagang atau memberi jasa.

Tabel 10.3. Profil Perempuan Buta Aksara di Empat Provinsi

Karakteristik	Bengkulu	Kalsel	Sulsel	NTT
1. Rata-rata umur	39	36	33	33
2. Rata-rata umur kawin pertama	15,85	14,85	20,60	20,50
3. Pendidikan tertinggi	Kelas 5 SD	Kelas 5 SD	Kelas 3 SD	Kelas 5 SD
4. Kemampuan membaca huruf latin	Minimal	Minimal	Tidak Ada	Minimal
5. Kemampuan membaca huruf arab	Baik	Baik	Minimal	-
6. Pekerjaan utama	Petani/ Pedagang	Petani/Pe- dagang/Lain	Petani/Peda- gang/Lain	Petani

Pendapat responden mengenai pentingnya kemampuan membaca dan menulis untuk bekerja ternyata bervariasi ada yang menganggap kurang penting seperti responden di Bengkulu dan Kalimantan Selatan, tetapi ada yang menganggap sangat penting (lihat Tabel 10.4). Umumnya responden yang sudah tua dan bekerja sebagai petani lebih banyak menganggap bahwa mereka tidak memerlukan kemampuan membaca dan menulis untuk dapat bekerja.

Walaupun berpendapat bahwa membaca dan menulis tidak diperlukan untuk bekerja, tetapi mereka tetap ingin bisa membaca dan menulis untuk menambah pengetahuan dan percaya diri. Sebagian besar dari mereka mengetahui ada kegiatan pemberantasan buta aksara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan sebagian besar ikut kegiatan pemberantasan buta aksara tersebut. Umumnya mereka yang tidak ikut kegiatan karena urusan rumahtangga, di mana tidak ada orang lain yang dapat mengambil alih peran mengurus anak dan rumahtangga jika mereka ikut kegiatan tersebut.

**Tabel 10.4.** Pentingnya Kemampuan Baca Tulis dan Pengetahuan PLS di Empat Provinsi

No	Karakteristik	Bengkulu	Kalsel	Suisel	NTT
1.	Perlunya kemampuan membaca dan menulis untuk bekerja	55%	40%	90%	75%
2.	Keinginan untuk bisa baca/tulis	75%	100%	100%	95%
3.	Alasan ingin bisa baca/tulis	Pengetahuan	Pengetahuan	Pengetahuan	Pengetahuan
4.	Pengetahuan tentang PLS <sup>1</sup>	Tinggi	Tinggi	Rendah <sup>2</sup>	Sedang <sup>2</sup>
5.	Mengetahui PLS dari	Aparat Desa		Aparat Desa	Masy. Desa
6.	Keikutsertaan PLS	Tinggi	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah
7.	Alasan tidak ikut PLS	Rumahtangga	Belum Ada PLS	Belum Ada PLS	Rumahtangga

Catatan: 1) PLS adalah (kegiatan) Pendidikan Luar Sekolah, misalnya KF, Paket A, B dan C

2) Hal ini karena di desa tersebut belum ada kegiatan pemberantasan buta aksara (KF)

Latar belakang keluarga biasanya mempengaruhi keadaan seseorang, termasuk kenapa seseorang menjadi buta aksara (lihat Tabel 10.5). Semua orang tua responden mempunyai kemampuan membaca dan menulis rendah, yaitu hanya sebagian kecil orang tua responden yang dapat membaca dan menulis. Jika di Bengkulu dan NTT kemampuan membaca dan menulis saudara kandung responden rendah, tetapi relatif tinggi di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Artinya sebagian besar responden memang berasal dari keluarga yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis rendah, meskipun ada satu-dua orang responden yang mengaku bahwa salah seorang saudara kandungnya telah bersekolah sampai SMU dan sarjana. Mereka menjelaskan bahwa saudara mereka bisa sekolah karena ada biaya, walaupun kebanyakan saudara kandung responden juga buta aksara, baik laki-laki maupun perempuan.

**Tabel 10.5.** Latar Belakang Keluarga Responden dan Alasan Tidak Sekolah di Empat Provinsi

Karakteristik	Bengkulu	Kalsel	Sulsel	NTT
1. Kemampuan baca/tulis orang tua	Rendah	Tinggi	Rendah	Rendah
2. Kemampuan baca/tulis saudara kandung	Rendah	Tinggi	Tinggi	Rendah
3. Pendidikan tertinggi saudara kandung	SLTA <sup>1</sup>	SLTA <sup>1</sup>	SLTA <sup>1</sup>	Sarjana <sup>1</sup>
4. Alasan saudara kandung sekolah	Ada biaya	Ada biaya	Ada biaya	Ada biaya
5. Jenis kelamin saudara kandung yang buta aksara	L dan P	L dan P	L dan P	L dan P

Catatan: 1) Hanya ada seorang responden yang mengaku punya saudara kandung berpendidikan sampai tingkat SLTA atau sarjana

## Faktor-faktor Sosial – Ekonomi Penyebab Buta Aksara Perempuan

Menurut pengakuan responden, banyak kerugian yang diderita oleh mereka akibat tidak berpendidikan, antara lain:

1. Ketertinggalan dalam pendidikan menyebabkan pengembangan usaha tersendat karena kegiatan di pasar membutuhkan bisa baca tulis.
2. Karena buta aksara, peternak ayam selalu rugi karena tidak bisa membaca aturan menggunakan obat yang tertera di bungkus atau botol obat.
3. Merasa minder walaupun nampak "gaya" tetap saja bila berkumpul dengan orang banyak terasa sebagai orang yang bodoh.
4. Pernah tersesat di kota waktu mau ke Rumah Sakit Umum karena tidak bisa membaca nama jalan. Ternyata petunjuk saja tidak cukup untuk berada di kota.
5. Karena kurang – tidak berpendidikan, sering terjadi salah pengertian dan sulit berkomunikasi. Banyak kata-kata yang tidak dimengerti, padahal kata-kata tersebut sudah dianggap biasa dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada saat berbisnis atau pada saat menonton televisi.

Walaupun disadari bahwa perempuan buta aksara akan bermasalah tetapi tetap saja ada kendala bagi perempuan untuk dapat mengecap pendidikan formal untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Beberapa alasan yang terkait dengan faktor sosial - budaya dan ekonomi yang terjadi pada masing-masing daerah kajian dijelaskan seperti di bawah ini:

### *Faktor Sosial - Budaya:*

#### 1. Bengkulu

Beberapa pandangan yang menjadi penghambat perempuan untuk mendapatkan pendidikan adalah:

*Pertama*, adanya anggapan dari masyarakat kemampuan baca-tulis lebih pantas untuk laki-laki daripada perempuan, karena

laki-laki akan lebih sering berhadapan dengan orang banyak dibanding perempuan. Hal ini terkait dengan pandangan bahwa laki-laki lebih berurusan dengan masyarakat, sementara perempuan bekerja di dalam rumahtangga. Pandangan ini akhirnya juga mempengaruhi keikutsertaan perempuan dalam program KF.

*Kedua*, adanya anggapan dari masyarakat bahwa bagi perempuan sudah cukup bisa membaca huruf arab, sehingga tidak perlu menambah pendidikan lagi.

*Ketiga*, masih lemahnya motivasi bersekolah dalam masyarakat, karena mereka sudah merasa puas dengan keadaan kehidupan sekarang sehingga tidak merasa perlu pendidikan yang lebih tinggi.

*Keempat*, dari sisi fasilitas pendidikan, SD baru ada pada tahun 1999 dan letak sekolah tersebut kebanyakan jauh dari desa.

## 2. Kalimantan Selatan

Faktor ketaatan kepada agama, yaitu Islam, mempengaruhi cara berpikir penduduk di Desa Tambak Batu Ulu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dalam hal pendidikan anak, mereka umumnya masih berpendapat bahwa pendidikan anak diutamakan di sekolah agama atau madrasah. Para orang tua juga beranggapan bahwa anak-anak tidak perlu sekolah tinggi, cukup sampai tingkat sekolah dasar atau kadangkala SMP saja. Anak-anak lebih diharuskan untuk mampu membaca Al Quran daripada kemampuan untuk membaca dan menulis. Anak laki-laki disiapkan untuk bekerja dengan cara 'magang' kepada orang tuanya, sampai siap menikah. Sementara, pendidikan untuk anak perempuan terbatas pada pendidikan agama dan asal bisa baca-tulis saja, setelah itu mereka dikeluarkan dari sekolah untuk membantu orang tua di rumah sambil menunggu masa menikah. Di desa merupakan hal yang umum anak laki-laki maupun perempuan usia sekolah (7 sampai 15 tahun) tidak lagi bersekolah, bahkan anak putus sekolah juga cukup banyak, apalagi bagi anak perempuan.

Pernikahan usia muda menjadi gejala umum di provinsi ini, dimana pada umumnya perempuan menikah di usia yang masih sangat muda, di daerah-daerah pedesaan perempuan menikah antara usia 12-16 tahun. Pada umumnya orang tua di pedesaan menikahkan anak perempuan pada usia dini dalam rangka menunaikan tanggungjawab sesuai agama (Islam) dan untuk menghindari resiko anak perempuan mereka dari akibat pergaulan bebas. Para orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya di madrasah karena sekolah madrasah biayanya lebih murah dan longgar pembayarannya (dapat dicicil sesuai kemampuan).

Selain faktor sosial - budaya di atas, dan kurangnya dorongan orang tua ternyata menyebabkan motivasi anak untuk bersekolah juga rendah. Menurut pembakar desa, proses pendidikan sekolah dasar yang longgar tidak memacu keinginan anak untuk disiplin dan tetap sekolah atau melanjutkan sekolah. Sebagai contoh, di desa masih ada sekolah dasar yang selalu melakukan kenaikan kelas pada siswanya, meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak mampu baca-tulis-hitung. Meskipun hal itu untuk menghindari anak-anak menjadi malas sekolah dan menjadi putus sekolah kalau tidak naik kelas.

### 3. Sulawesi Selatan

Banyaknya penduduk perempuan usia produktif yang masih buta aksara karena masih kuatnya pandangan di kalangan masyarakat desa bahwa anak-anak tidak perlu sekolah. Jadi hal ini tidak terbatas untuk anak perempuan saja tetapi juga anak laki-laki. Hal ini terkait dengan jumlah anak dalam keluarga, di kalangan orangtua dulu jumlah anak cenderung banyak, sehingga menyebabkan tidak semua anak berkesempatan untuk bersekolah. Walaupun ada anak yang bersekolah lebih karena pada saat masa pendaftaran sekolah orangtuanya memiliki uang untuk menyekolahkan anaknya.

Di pedesaan, jumlah perempuan usia produktif yang buta aksara relatif lebih banyak dibandingkan laki-laki. Hal ini karena masih

adanya nilai-nilai yang mendahulukan laki-laki untuk bersekolah dibandingkan perempuan. Selain itu, masih kuatnya pandangan bahwa perempuan pada akhirnya akan kembali ke dapur menyebabkan adanya anggapan bahwa bersekolah lebih diperlukan untuk laki-laki dibandingkan untuk perempuan.

Selain itu, 32 tahun lalu, sekolah belum merata di setiap desa terutama untuk daerah terpencil sangat sulit dijumpai adanya sekolah. Di kecamatan yang relatif terpencil biasanya angka buta aksara cukup tinggi, tidak hanya untuk perempuan tetapi juga untuk laki-laki. Namun sekarang, sarana sekolah sudah relatif lebih merata di setiap desa. Untuk usia sekolah sekarang, angka buta aksara relatif lebih kecil.

#### 4. Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubdin Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga, dinas Pendidikan Kabupaten Kupang, bahwasanya pengaruh sosial-budaya terutama di pedesaan masih menjadi kendala dalam bidang pendidikan. Diantaranya keputusan yang terkait dengan pendidikan anak-anak masih ditentukan oleh orangtua. Pada dua atau tiga dekade ke belakang, pendidikan masih dianggap hal yang sia-sia bagi orangtua, karena tidak menghasilkan sesuatu yang langsung dapat dirasakan manfaatnya, karenanya mereka lebih banyak memilih anak-anaknya untuk bekerja atau menikah secepat mungkin bagi perempuan. Seiring dengan perkembangan zaman, kondisi tersebut saat ini mengalami perubahan sedikit demi sedikit, orangtua sekarang sudah mulai menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya, sehingga istilah 'biarlah saya yang bodoh, asal jangan anak-anak' pun ditemui di desa ini.

Sebagian besar penduduk Desa Oebelo dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya, menganut agama katolik. Kepedulian gereja terhadap bidang pendidikan cukup besar, misalnya dengan membangun sekolah tingkat dasar di perkampungan. Sebagai contoh, keberadaan TK di desa Oebelo merupakan

sumbangan dari Kupang CCF, yang disediakan bagi penduduk setempat khususnya di Kampung Baru tanpa dipungut biaya.

### *Faktor Ekonomi*

#### 1. Bengkulu

Keterbatasan kesempatan kerja di desa, bahkan untuk mereka yang berpendidikan tinggi, memunculkan pandangan di kalangan masyarakat bahwa tidak ada gunanya sekolah tinggi kalau juga akhirnya menganggur, atau hanya akan bekerja di sawah/kebun juga. Selain itu, bagi penduduk Desa Sumber Rejo, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Kerkap, Provinsi Bengkulu, anak-anak adalah tenaga kerja keluarga yang sangat penting. Pada saat panen kopi, maka seluruh keluarga, termasuk anak-anak akan diboyong ke *talang* (kebon kopi) untuk panen. Hal ini mengakibatkan anak-anak kerap kali harus membolos sekolah.

Selain cara berpikir yang salah, dengan menganggap bahwa pendidikan bukan satu-satunya penentu keberhasilan hidup, maka faktor kemiskinan merupakan faktor penentu bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anak-anaknya. Meskipun uang sekolah gratis, tetapi di awal sekolah para orang tua harus menyiapkan uang sekitar Rp. 250.000 sampai Rp. 350.000, dan juga harus membiayai kebutuhan lainnya seperti ongkos, seragam, alat tulis, dan lain-lain.

#### 2. Kalimantan Selatan

Kondisi kemiskinan rumahtangga dan langkanya kesempatan kerja formal menjadi penyebab utama masih banyaknya perempuan buta aksara di Kecamatan Martapura. Keluarga miskin dan berkecenderungan memiliki banyak anak, maka kesempatan bagi anak perempuan untuk mengenyam pendidikan lebih kecil dibandingkan anak laki-laki. Dengan kata lain, rendahnya kesempatan berpendidikan dasar karena ketidakmampuan rumahtangga miskin untuk membiayai pendidikan. Di sisi lain, masih terbatasnya kesempatan kerja formal di daerah juga memunculkan pandangan di kalangan

orangtua bahwa "buat apa berpendidikan tinggi, jika pada akhirnya tidak bekerja". Jenis-jenis pekerjaan yang tersedia di desa masih terbatas pada pekerjaan berburuh dengan upah rendah. Kondisi ini menyebabkan anak-anak yang paling besar atau yang dianggap sudah mampu membantu orangtua berhenti didorong para orang tua untuk berhenti sekolah, dan membantu pekerjaan rumah tangga (bagi anak perempuan) atau membantu mencari nafkah (bagi anak laki-laki).

### 3. Sulawesi Selatan

Masih adanya pandangan di kalangan orangtua maupun generasi muda, bahwa biarpun memiliki pendidikan, belum tentu bisa menjadi pegawai negeri atau memperoleh pekerjaan. Akibatnya masyarakat berpendapat tidak ada gunanya bersekolah tinggi jika pada akhirnya akan menganggur. Jika seorang perempuan sudah mampu mencari nafkah sendiri misalnya dengan berjualan kue atau bekerja di kebun, maka mereka tidak lagi termotivasi untuk bersekolah.

Alasan lain adalah keterbatasan kemampuan orang tua untuk membiayai sekolah. Pada keluarga yang tidak mampu, anak-anak lebih didorong untuk membantu orang tua mencari nafkah daripada untuk bersekolah.

### 4. Nusa Tenggara Timur

Faktor ekonomi menjadi penyebab utama tingginya tingkat buta aksara khususnya bagi perempuan di NTT. Pada masa dua atau tiga dekade lalu, pada masa usia sekolah kelompok usia produktif saat ini, para orang lebih mengharuskan anak-anak untuk membantu orangtua mencari nafkah dengan bekerja di ladang daripada bersekolah. Para orangtua hanya mampu membayar uang sekolah saja, tetapi kurang mampu membiayai kebutuhan sekolah lain, seperti baju seragam, peralatan sekolah, sepatu dan ongkos transport. Akibatnya para orang tua hanya mampu menyekolahkan anak-anak mereka hanya sampai kelas 1 atau 2 SD, kemudian putus sekolah, dan anak-anak tetap buta aksara.

## KESIMPULAN

### Jenis-jenis Kegiatan PKBM

Dalam upaya untuk memberantas buta aksara di kalangan perempuan usia produktif maka telah diselenggarakan berbagai kegiatan yang tertuang dalam lembaga PKBM. PKBM adalah sarana untuk mengidentifikasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat, yang pelaksanaannya di pusatkan di satu tempat yang mulai dirintis mulai 1998. PKBM adalah lembaga PLS yang didirikan dengan salah satu tujuannya untuk mengentaskan buta aksara, merupakan program kerjasama antara Diknas, Depsos dan Depkes dengan UNESCO.

PKBM harus berbadan hukum dan memenuhi syarat/ketentuan yang telah ditetapkan melalui prosedur hukum yang jelas dalam pembentuknya. Terdapat dana operasional dalam bentuk bantuan cuma-cuma kepada PKBM selama alokasi waktu satu tahun proyek dan akan diteruskan pada tahun berikutnya selama PKBM menunjukkan suatu indikasi kemajuan dalam sistem pendidikan dan warga binaan yang dididik. Sasaran PKBM selama ini lebih cenderung pada: anak-anak, pemuda-pemudi putus sekolah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin melanjutkan sekolah, pelajar/siswa yang berasal dari keluarga miskin/terlantar yang tidak memiliki biaya untuk sekolah namun memiliki semangat dan keinginan untuk melanjutkan pendidikan, keluarga miskin, WRSE, masyarakat yang masih buta aksara dan angka.

PLS dalam bentuk PKBM ini cukup menunjang terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat baik dari sektor informal maupun usaha. Hal ini ditunjukkan dari tidak sedikit tamatan PKBM yang telah berhasil membuat lapangan pekerjaan baru baik yang sifatnya individu maupun kelompok yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya bagi diri individu bersangkutan dan keluarganya. Di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, ada KBU yang mempunyai usaha pembuatan atap nipah. Pesertanya pada awalnya tidak mempunyai pekerjaan tetap, tetapi sekarang sudah memiliki usaha.

Penyelenggara dan sumber biaya PKBM adalah Depdiknas RI melalui Dinas Pendidikan Nasional sebagai perpanjangan tangan dalam tugas sebagai pelaksana teknis, kemudian diserahkan pada masyarakat pada tingkat desa/kelurahan atau lokasi pemukiman penduduk sebagai pelaksana setempat. Sementara itu unsur pemberdayaan perempuan, di tingkat daerah, misalnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan di Provinsi Kalimantan Selatan belum mempunyai program yang secara langsung menangani buta aksara perempuan. Umumnya program unsur pemberdayaan perempuan adalah meningkatkan peran ekonomi perempuan dengan penggunaan teknologi tepat guna dan pemanfaatan kredit kecil dalam rangka mengurangi kemiskinan. Akibatnya, di lapangan, Diknas nampak menjadi agen tunggal pemerintah untuk kegiatan pemberantasan buta aksara perempuan. Di beberapa tempat terdapat LSM yang membantu sebagai pelaksanaan dan juga penyandang dana kegiatan tersebut. Di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, lembaga non-pemerintah yang terkait dengan aktifitas PLS/KF diantaranya adalah YLPM dan PKBM Sandika yang terletak wilayah Kecamatan Somba Opu.

Program PKBM terdiri dari beberapa program antara lain:

- Program PAUD/*Playgroup*, yaitu program untuk membelajarkan anak usia dini atau anak yang belum sekolah TK untuk mengenal gambar, warna, alat tulis dan lain-lain.
- Program KF, yaitu program untuk membelajarkan masyarakat buta aksara sehingga memiliki kemampuan baca tulis, hitung dan bahasa Indonesia serta pengetahuan dasar sebagai wujud masyarakat gemar belajar.
- Program Paket A (Setara SD). Program ini adalah untuk membantu warga belajar agar memiliki pengetahuan, kemampuan dan sikap setara dengan tamatan SD di PKBM yang terdiri dari setara SD kelas 4, 5 dan 6.
- Program Paket B (Setara SLTP). Program yang memberikan pelayanan pendidikan bagi mereka yang karena sesuatu hal tidak

berkesempatan menamatkan dan mengenyam pendidikan melalui jalur sekolah. Sebagian mereka memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap setara dengan anak tamatan SLTP formal.

- Program Paket C (Setara SLTA) jurusan IPS. Program yang memberikan pelayanan pendidikan bagi mereka yang karena sesuatu hal tidak berkesempatan menamatkan dan mengenyam pendidikan melalui jalur sekolah. Sebagian mereka memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap setara dengan anak tamatan SLTA.
- Program magang. Suatu program magang yang dilaksanakan oleh PKBM dengan harapan warga belajar dapat bekerja dapat bekerja berdasarkan bakat keterampilan (*life skill*), baik pekerja kelompok, bekerja pada orang lain atau bekerja usaha sendiri, paling tidak warga belajar telah memiliki suatu keterampilan yang berguna untuk meningkatkan kemampuan dirinya sendiri. Contoh program magang, misalnya magang/kursus pertukangan kayu, magang/kursus bengkel las, serta magang/kursus teknisi dan operator komputer. Nampaknya tidak ada program magang untuk perempuan.
- Program KBU. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu masyarakat yang mau berusaha tetapi kurang memiliki modal. Pelaksanaan KF.

Salah satu program PKBM yang cocok untuk perempuan buta aksara usia produktif adalah program KF. Tujuan dari pelaksanaan program KF adalah:

1. Sebanyak 10 orang warga belajar dapat membaca, menulis dan berhitung;
2. Warga belajar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang dapat meningkatkan penghasilan keluarga;
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan dan manfaat program KF;

4. Warga masyarakat di sekitar tempat penyelenggaraan program memberikan respon positif dan dapat melaksanakan manfaat keberadaan program kelompok belajar KF.

Proses belajar dalam kelompok belajar program KF dilaksanakan dengan mempertimbangkan waktu, disesuaikan dengan waktu luang dari peserta warga belajar dan tutor. Selain itu, tempat belajar disesuaikan dengan kondisi yang ada, ada yang di rumah, teras rumah, halaman rumah, maupun di sawah.

Setelah ikut program KF, untuk pelestarian dan pembinaan kemampuan membaca, menulis dan berhitung lulusan akan diarahkan ke Program KBU. Dalam program KBU ini peserta harus menunjukkan sertifikat telah mengikuti program KF. Hal ini mengingat bahwa dalam program KF tidak semua peserta sudah lancar kemampuan calistungnya. Dengan ikut program KBU, proses belajar calistungnya bisa dilanjutkan secara tematik (sesuai dengan paket usaha yang dilaksanakan). Program KBU ini untuk mempertajam keterampilan dan dapat digunakan sebagai bekal pencaharian nafkah mereka, sehingga mereka juga akan mendapat manfaat praktis dari mengikuti program belajar. Sebenarnya dalam program KF juga ada bekal ketrampilan, namun sangat terbatas waktunya dan dapat tergantung keterampilan yang dimiliki para tutornya.

Program KF sudah diselenggarakan di semua kecamatan lokasi pengumpulan data dasar kebutaaksaraan perempuan ini, namun belum semua desa di dalam wilayah kecamatan tersebut sudah pernah memperoleh program KF, termasuk semua desa yang menjadi lokasi pengumpulan data dasar ini. Informasi dan data mengenai pelaksanaan KF dan segala permasalahannya dikumpulkan dari hasil FGD yang mengikutsertakan *stakeholders* KF di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Penentuan program KF dilakukan di tingkat kecamatan, artinya pihak desa hanya menerima program tersebut.

Sebagai pelaksana program KF adalah Dinas Pendidikan Nasional, dalam hal ini adalah Kasie PLS di tingkat kabupaten dan kecamatan.

Di tingkat kecamatan Penilik Dikmas (PLS di tingkat kecamatan) dibantu oleh TLD yang diangkat oleh pihak provinsi. Tenaga TLD adalah para sarjana yang diangkat sebagai tenaga kontrak, dengan honor sebesar Rp. 700.000 per bulan (di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan). Sebagai tutor dalam program KF ini diambil dari masyarakat setempat, biasanya dari kalangan tokoh masyarakat atau guru.

Pelaksanaan program KF dilaksanakan dalam waktu enam bulan. Waktu pelaksanaan kegiatan belajar dalam program KF tergantung ketersediaan waktu dari peserta dan tutornya. Dalam satu minggu pertemuan berlangsung antara 3-5 kali dan setiap pertemuan sekitar dua jam tetapi bisa juga lebih. Kalau peserta masih mau belajar, maka waktu bisa lebih dari dua jam. Untuk mensiasati waktu, pada musim kemarau biasanya pertemuan lebih sering karena waktu peserta lebih banyak tersedia. Sementara pada musim penghujan (November dan Desember) jumlah pertemuan per minggunya lebih jarang. Pada bulan ini peserta biasanya lebih banyak konsentrasi ke pekerjaan di sawah. Selain itu, proses belajar dalam paket KF dilakukan secara *andragogy*, dimana warga belajar dibimbing dalam nuansa belajar orang dewasa. Keleluasaan belajar diberikan kepada warga belajar, mengingat mereka merupakan orang dewasa yang memiliki kemampuan potensial dalam praktek sehari-hari namun belum dapat menuangkan dalam bahasa tertulis dan lisan. Oleh karena itu, proses pengajaran dan pendidikan juga dilakukan dengan menggunakan bahasa ibu (Misalnya di Kalimantan Selatan KF diselenggarakan dengan Bahasa Banjar).

Program KF untuk mengatasi buta aksara terdiri dari tiga tahapan yaitu: pemberantasan-pembinaan-pelestarian. Pemberantasan dalam makna keberhasilan program menjadikan WB mampu secara memadai untuk membaca-menulis-berhitung (terentas dari kondisi buta aksara). Pembinaan dalam makna WB peserta Paket KF secara berkesinambungan diberikan pembinaan usaha-usaha ekonomis produktif sehingga dapat mengaplikasikan materi belajar tanpa terganggu oleh permasalahan ekonomi. Selanjutnya Pelestarian bermakna WB setelah mampu secara teknis dalam usaha ekonomi

dibina seperti melalui jalinan tataniaga produk-produk usaha yang telah ditekuninya.

### **Masalah dalam Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional**

Dalam pelaksanaan PKBM KF terdapat berbagai masalah yang dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu dari sudut pelaksanaan program dan dari sudut sosial - ekonomi masyarakat. Permasalahan itu ternyata dilontarkan dalam pelaksanaan program KF di empat lokasi pengumpulan data. Masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut:

#### **A. Masalah dalam pelaksanaan program KF:**

1. Keterbatasan dana dari pemerintah (dan masyarakat) mengakibatkan kinerja PKBM dalam bentuk program KF kurang aktif dan kurang berfungsi, yang dapat diidentifikasi dari: (a) Tidak adanya kesinambungan program KF, di mana dengan menerapkan sistem pemerataan maka dengan dana terbatas itu program KF diupayakan menjangkau banyak desa tetapi hanya cukup untuk mencapai tahap pertama, yaitu "Pemberantasan saja. Akibatnya setelah selesai tahap ini, para wajib belajar juga berhenti belajar, karena tidak ada dana untuk Pembinaan dan Pelestarian. Hal ini menyebabkan para wajib belajar akan berpotensi menjadi buta aksara kembali; (b) Tidak lengkapnya unsur paket KF, yaitu tidak tersedianya Buku Paket Belajar dan TBM, sehingga tidak ada fasilitas bagi wajib belajar untuk mempraktekkan hasil belajarnya, sehingga berpotensi menjadi buta aksara kembali setelah selesai belajar; (c) Banyak tutor yang mengundurkan diri karena honor tidak atau selalu terlambat dibayar.
2. Program KF mensyaratkan bahwa sebuah kelompok belajar program KF adalah harus terdiri dari 10 orang. Akibatnya perempuan usia produktif buta aksara yang tinggal di daerah terpencil dan jumlahnya kurang dari 10 akan terlewatkan oleh program KF. Jika mereka ingin ikut menjadi wajib belajar

maka jarak dan transportasi dari rumah ke tempat belajar akan menjadi kendala.

3. Organisasi pelaksana program KF belum terkoordinasikan antar *stakeholders*. Nampak di lapangan bahan program KF adalah milik Dinas Pendidikan Nasional, karena tidak nampak peran *stakeholders* lain dalam pemberantasan buta aksara perempuan usia produktif, seperti Pemberdayaan Perempuan atau Dinas Sosial. Di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, bagian Pemberdayaan Perempuan Badan Pengembangan Masyarakat berperan untuk menangani KBU.
  4. Kurangnya keterlibatan LSM dan masyarakat dalam kegiatan pemberantasan perempuan usia produktif buta aksara, dan semakin kurangnya jumlah sukarelawan untuk terlibat dalam kegiatan ini.
  5. Pada tempat yang sudah ada KBU maka ada persoalan antara lain: (a) Tidak terjaminnya keberlanjutan pelaksanaan KBU karena keterbatasan modal; (b) Ketidakmampuan pengelola KBU untuk mengakses modal dari lembaga keuangan yang lain; (c) Anggota KBU kurang trampil dan kurang kreatif, sehingga tidak mampu menciptakan produk-produk baru dan cenderung meniru produk yang sudah ada; (d) Masih lemahnya kemampuan manajerial dari pengelola KBU sehingga tidak mampu membuat pembukuan atas aktifitas usaha; (e) Masih lemahnya akses pemasaran produk.
- B. Masalah yang berkaitan dengan sosial - ekonomi masyarakat, berkaitan dengan perbedaan peran gender dalam masyarakat dan kemiskinan, antara lain:
1. Adanya perasaan malu di kalangan penyandang buta aksara, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengakui bahwa mereka buta aksara, sehingga mempersulit pelaksanaan pendataan, dan mereka juga malu untuk mengikuti proses belajar, karena merasa sudah tua dan mempunyai anak.

2. Bagi perempuan, maka alasan repot mengurus anak dan rumahtangga merupakan kendala utama rendahnya partisipasi perempuan buta aksara dalam program PKBM. Seringkali dalam rumahtangga miskin, pembagian peran dalam rumahtangga sedemikian ketat, bahwa laki-laki harus terus bekerja sepanjang waktu untuk memperoleh nafkah, sementara perempuan harus menjaga anak-anak dan mengerjakan pekerjaan domestik.
3. Ada sebagian perempuan buta aksara yang tidak merasa perlu mempunyai kemampuan baca-tulis untuk dapat bekerja.
4. Pendapat orangtua yang para ulama yang lebih mementingkan pendidikan agama bagi anak perempuan, mengakibatkan rendahnya partisipasi sekolah anak perempuan dan pada masanya akan menciptakan perempuan buta aksara di usia produktif.
5. Belum tersedianya sarana sekolah yang berdekatan dengan rumah di masa lalu mengakibatkan anak-anak perempuan tidak dikirim ke sekolah oleh para orang tua karena mengkhawatirkan keselamatan mereka.
6. Kemiskinan mengakibatkan para orang tua tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka, baik anak laki-laki maupun perempuan. Anak-anak merupakan sumber tenaga kerja dalam rumahtangga untuk dapat membantu orang tua mendapatkan nafkah bagi rumahtangga.
7. Dalam situasi kemiskinan tersebut, anak perempuan umumnya akan dikeluarkan dari sekolah lebih dahulu, karena adanya pemahaman di kalangan orangtua dan masyarakat bahwa perempuan akan berada di rumah saja sehingga tidak perlu sekolah tinggi.
8. Kemiskinan juga mengakibatkan perempuan usia produktif yang buta huruf enggan mengikuti program pemberantasan buta huruf atau program PLS lain, karena mereka harus juga

harus ikut mencari nafkah, sehingga tidak ada waktu untuk mengikuti program KF.

### **Strategi Penanganan Buta Aksara Perempuan**

Dari hasil FGD di tingkat kecamatan dengan *stakeholders* terkait, terumuskan strategi langkah-langkah penanganan buta aksara perempuan, melalui:

1. Melakukan penyadaran pentingnya bebas buta aksara bervisi gender sampai daerah pedesaan agar masyarakat desa (termasuk kepala desa, tokoh masyarakat, dan para tokoh agama desa) mengubah pandangan bahwa perempuan usia produktif yang buta aksara dianggap sudah tua, tidak perlu sekolah lagi. Kenyataannya, mereka banyak terlibat dalam kegiatan ekonomi, membeli bahan kebutuhan sehari-hari, maupun kegiatan nafkah dengan berjualan. Dalam bekerja, mereka membutuhkan keterampilan membaca, menulis dan berhitung, supaya tidak mudah ditipu orang. Penyadaran ini tidak hanya dilakukan di perkotaan tetapi juga pedesaan dan pada beragam tingkatan pemerintahan maupun tokoh masyarakat.
2. Mengembangkan program KF secara tematik dan didukung bahan ajar bervisi gender agar lebih sesuai dengan kebutuhan belajar peserta KF yang berstatus orang dewasa. Oleh karena itu pelaksanaan program KF juga dapat melibatkan instansi teknis lainnya seperti Dinas Pertanian. Selain itu perlu diberikan bahan ajar/buku bacaan/materi belajar yang bervisi gender, sesuai dengan statusnya sebagai orang dewasa.
3. Memberikan pelatihan bagi tutor untuk membuat bahan ajar tematik dan bervisi gender, karena tidak semua tutor dapat membuat bahan ajar tematik dan bervisi gender.
4. Mengembangkan program KF yang berkelanjutan kepada program KBU, sehingga bisa berlanjut proses pembelajarannya dan diarahkan untuk dapat meningkatkan taraf hidup keluarga. Dengan demikian program pemberantasan buta aksara akan

terintegrasi dengan program pemberantasan kemiskinan, dan warga belajar dapat melihat manfaat praktis dari mengikuti program KF. Dalam pengembangan KBU termasuk di dalamnya adalah membuka akses permodalan ke berbagai lembaga keuangan bagi pengelola KBU dan membuka akses pemasaran bagi produk yang dihasilkan KBU.

5. Pendataan warga perempuan usia produktif buta aksara harus dilakukan dengan cermat, sehingga tidak ada yang lewat cacah. Diperlukan partisipasi tokoh masyarakat/ulama untuk menghimbau warga yang sesuai syarat program pemberantasan buta aksara untuk ikut program tersebut.
6. Pembenahan koordinasi antar instansi vertikal dan horisontal harus dilakukan, karena sampai saat ini masih terjadi kelemahan koordinasi antara *stakeholders* pemberantasan buta aksara perempuan, yaitu antara Pemerintah Desa – TLD - Penilik - Dinas Pendidikan Nasional - Pemerintah Kecamatan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta Dinas Pendidikan Nasional Provinsi dan unsur pemberdayaan perempuan. Koordinasi dengan dinas lain juga perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan KBU.
7. Melibatkan lebih banyak pihak swasta, LSM, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat luas untuk terlibat langsung, baik dalam mendanai atau melaksanakan program pemberantasan buta aksara. Termasuk di dalamnya melibatkan secara aktif PKK dan ulama dalam pelaksanaan KF agar masyarakat memahami pentingnya perempuan usia produktif untuk dapat membaca-menulis-berhitung untuk meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan bekerja dan mengurus rumah tangga.

## REFERENSI

- Aminullah. nd. Akan Berhasilkah Pemberantasan Buta Huruf di Indonesia.  
" <http://www.google.co.id/search?q=Aminullah+KF&ie=utf-8&oe=utf->

&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a.[diakses 16 Januari 2009].

Amirudin, Mariana. 2005. *Jurnal Perempuan: Rekomendasi UNESCO Konsep Keberaksaraan (Literacy) yang Pluralistik dan Setara Gender*. Yayasan Jurnal: Jakarta.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI 2005. RPJMN 2004-2009: Bab 27 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas (Sesuai Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009). Bappenas: Jakarta.

BPS dan Depdiknas. 2006. Ringkasan Laporan Hasil Survei Buta Aksara Tahun. Departemen Pendidikan Nasional RI: Jakarta.

Maryatun. 2005. Survei Tentang Manfaat Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Keaksaraan Fungsional (KF) di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sri Makmur Desa Silebu Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Popinsi Banten. Universitas Negeri Jakarta: Jakarta.

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. 2005. Laporan Akhir, Penyusunan Data Dasar (Baseline Data Buta Aksara Perempuan). Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia: Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2007. Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Buta huruf Perempuan 2007-2011. Kementerian Pemberdayaan Perempuan: Jakarta.

Ministry of National Education RI. 2005. *Meta Analysis Study of Gender In Education*. Ministry of National Education Republic of Indonesia: Jakarta.

Pulu, Lily, et al. 2006. Modul Pendidikan Adil Gender. Kapal Perempuan dan Access-AusAid: Jakarta.

UNDP. 2005. Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium Indonesia. <http://www.undp.or.id/pubs/imdg2005/BI/TUJUAN%203>. [Diakses pada tanggal 11 November 2007]

UNESCO. 2006. Laporan Global PUS 2006: Keaksaraan Bagi Kehidupan. <Http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001442/144270IND>. [Diakses pada tanggal 11 November 2007]

